



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH RI**

PERJANJIAN KINERJA **2017**

Profesional, Akuntabel, dan Modern



DEWAN PERWAKILAN DAERAH
SEKRETARIAT JENDERAL

**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2017

SEKRETARIS JENDERAL,

Prof. Dr. SUDARSONO HARDJOSOEKARTO
NIP. 195711251983031001



DEWAN PERWAKILAN DAERAH
SEKRETARIAT JENDERAL

**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN TARGET
1	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas fungsi DPD RI yang profesional dan akuntabel	1. Persentase responden Anggota DPD RI yang puas dengan dukungan administratif keahlian Setjen DPD RI terhadap pelaksanaan tugas fungsi DPD RI	80%	Persentase
		2. Persentase draft keputusan/peraturan DPD RI yang digunakan sebagai Keputusan/Peraturan DPD RI	95%	Persentase
2	Terwujudnya dukungan kegiatan Pimpinan DPD RI dalam penguatan kelembagaan DPD RI yang profesional dan akuntabel	3. Presentase responden Pimpinan DPD RI yang puas dengan dukungan kesekretariatan terhadap kegiatan Pimpinan DPD RI dalam rangka penguatan kelembagaan DPD RI	100%	Persentase
3	Terwujudnya pengelolaan data, informasi dan hasil kajian yang secara profesional dan modern mampu mendukung pelaksanaan tugas fungsi DPD RI	4. Persentase Anggota DPD yang puas terhadap pengelolaan data informasi Sekretariat Jenderal DPD RI	65%	Persentase
		5. Presentase hasil tabulasi aspirasi masyarakat daerah yang digunakan oleh alat kelengkapan	80%	Persentase
		6. Persentase hasil kajian yang digunakan oleh alat kelengkapan DPD RI	85%	Persentase

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN TARGET
4	Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat Jenderal DPD RI yang secara profesional dan akuntabel mampu mendukung pelaksanaan tugas fungsi DPD RI	7. Nilai Reformasi Birokrasi	75	Nilai
		8. Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	Opini BPK
		9. Predikat SAKIP	B	Predikat

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Kegiatan dukungan Perencanaan dan Penetapan Usul Prolegnas DPD RI	Rp1.580.475.000,-
2	Kegiatan dukungan Penyusunan RUU usul dari DPD RI	Rp53.634.585.000,-
3	Kegiatan dukungan penyusunan pandangan/pendapat dan pertimbangan DPD RI atas RUU tertentu	Rp12.730.975.000,-
4	Kegiatan dukungan penyusunan hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan undang-undang tertentu	Rp28.585.780.000,-
5	Kegiatan dukungan persidangan/rapat DPD RI	Rp11.249.930.000,-
6	Kegiatan dukungan pelaksanaan tugas dan kewenangan Badan Akuntabilitas Publik	Rp2.944.450.000,-
7	Kegiatan dukungan pelaksanaan tugas dan kewenangan PURT	Rp737.500.000,-
8	Kegiatan dukungan pelaksanaan tugas dan kewenangan Panmus	Rp1.450.400.000,-
9	Kegiatan dukungan pelaksanaan tugas dan kewenangan Badan Kehormatan	Rp1.154.395.000,-
10	Kegiatan Pelaksanaan dan Pemasyarakatan Keputusan DPD RI	Rp8.705.465.000,-
11	Kegiatan Pertemuan/ Konsultasi DPD dengan Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, dan unsur masyarakat daerah	Rp4.531.230.000,-
12	Kegiatan Kesekretariatan dan Keprotokolan Pimpinan DPD RI	Rp5.450.630.000,-
13	Kegiatan kehumasan/pemberitaan/ publikasi kegiatan DPD RI	Rp.3.868.355.000,-

14	Kegiatan Penyusunan bahan-bahan sosialisasi DPD RI	Rp1.019.225.000,-
15	Kegiatan pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi manajemen	Rp4.013.000.000,-
16	Kegiatan Tabulasi hasil penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah	Rp805.000.000,-
17	Kegiatan kajian terhadap isu strategis kedaerahan	Rp1.041.190.000,-
18	Kegiatan kajian kebijakan tertentu	Rp647.400.000,-
19	Kegiatan kajian tentang hukum dan perundang-undangan	Rp293.600.000,-
20	Kegiatan penyusunan analisis kebutuhan personil	Rp135.000.000,-
21	Kegiatan penyusunan analisa jabatan dan evaluasi jabatan	Rp234.000.000,-
22	Kegiatan penyusunan analisa beban kerja	Rp135.000.000,-
23	Kegiatan penyusunan standard kompetensi	Rp120.000.000,-
24	Kegiatan manajemen informasi dan administrasi SDM	Rp90.000.000,-
25	Kegiatan pendidikan dan pelatihan Sekretariat Jenderal DPD RI	Rp1.211.502.000,-
26	Kegiatan assesment sumber daya manusia	Rp382.800.000,-
27	Kegiatan penyusunan SAKIP Sekretariat Jenderal DPD RI	Rp219.000.000,-
28	Kegiatan penyusunan standard prosedur kerja Sekretariat Jenderal DPD RI	Rp234.000.000,-
29	Kegiatan evaluasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPD RI	Rp168.750.000,-
30	Kegiatan evaluasi kelembagaan Sekretariat Jenderal DPD RI	Rp75.000.000,-
31	Kegiatan penataan SOTK Sekretariat Jenderal DPD RI	Rp211.500.000,-
32	Kegiatan penyusunan sistem dan prosedur teknis kelembagaan dan ketatalaksanaan kantor DPD RI di Provinsi	Rp410.750.000,-
33	Kegiatan penatausahaan, pembukuan verifikasi dan pelaksana anggaran	Rp1.266.897.000,-
34	Kegiatan monitoring	Rp104.600.000,-

35	Kegiatan reuiu	Rp181.100.000,-
36	Kegiatan pengadaan peralatan penunjang operasional	Rp2.931.729.000,-
37	Kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor	Rp23.999.999.000,-

Jakarta, Januari 2017

SEKRETARIS JENDERAL,



Prof. Dr. SUDARSONO HARDJOSOEKARTO
NIP. 195711251983031001



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH RI**



Komplek Parlemen MPR/DPR/DPD RI
JL. Gatot Subroto No. 6 Senayan Jakarta 10270



+ 622157897448



dpdriortala@gmail.com

www.dpd.go.id